BAB II

PERAN DONALD TRUMP DALAM DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT-TIONGKOK-TAIWAN

Pada BAB II ini menjelaskan gambaran dari Dinamika Amerika Serikat-Tiongkok dan Taiwan serta peran Donal Trump dalam konflik tersebut. Penjelasan akan dipaparkan dalam beberapa subbag yang mencakup penjelasan dinamika hubungan antara Tiongkok-Taiwan sebagai dasar konflik, peran dan kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Tiongkok–Taiwan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Tiongkok–Taiwan pada masa Donald Trump, gaya kepemimpinan Donald Trump dalam kebijakan luar negeri.

2.1 Dinamika Hubungan Tiongkok–Taiwan

Hubungan antara Tiongkok-Taiwan merupakan salah satu konflik yang paling kompleks di kawasan Asia Timur. Hubungan kedua pihak tidak hanya dipengaruhi oleh sengketa politik mengenai status Taiwan, namun juga dikarenakan adanya interaksi ekonomi yang sudah berkembang sejak 1990-an (G. Lin & Hu, 2007). Di satu sisi, Tiongkok dan Taiwan memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang erat, namun kedua negara memiliki perbedaan pandangan mengenai kemandirian Taiwan yang kian memicu ketegangan politik dan keamanan wilayah.

2.1.1 *One China Principle* dan Status Politik Taiwan

Salah satu sumber utama ketegangan dalam hubungan Tiongkok dan Taiwan adalah perbedaan pandangan mengenai status politik Taiwan. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berpegang pada prinsip *One China Principle* yang menyatakan bahwa hanya terdapat satu Tiongkok dan Taiwan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Tiongkok. Berdasarkan prinsip tersebut, pemerintah Tiongkok secara konsisten menolak segala bentuk pengakuan internasional terhadap Taiwan sebagai negara yang merdeka dan menegaskan bahwa reunifikasi Taiwan dengan Tiongkok daratan merupakan tujuan yang harus diwujudkan. Menurut Lin dan Hu (2007), isu Taiwan merupakan salah satu persoalan paling sensitif dalam hubungan Tiongkok dengan negara-negara lain karena berkaitan langsung dengan kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok.

Di sisi lain, Taiwan yang secara resmi menggunakan nama Republic of China (ROC) memiliki pemerintahan, sistem politik, militer, serta konstitusi yang berjalan secara terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok sejak berakhirnya Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949. Meskipun sebagian besar negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, pulau tersebut tetap menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri dan aktif menjalin hubungan ekonomi maupun politik dengan berbagai negara. Menurut Atiq et al. (2025), kondisi tersebut menyebabkan status Taiwan menjadi unik dalam politik internasional karena memiliki karakteristik sebagai sebuah negara secara de facto, namun tidak memperoleh pengakuan internasional secara penuh sebagai negara berdaulat.

Perbedaan pandangan mengenai status politik Taiwan menciptakan ambiguitas yang hingga saat ini masih menjadi sumber utama konflik lintas selat. Bagi Tiongkok, Taiwan merupakan wilayah yang belum direunifikasi, sedangkan bagi sebagian masyarakat Taiwan, identitas politik Taiwan berkembang secara terpisah dari identitas nasional Tiongkok. Perbedaan persepsi tersebut

menyebabkan hubungan Tiongkok dan Taiwan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh persoalan kedaulatan, identitas nasional, dan keamanan kawasan yang terus berkembang hingga saat ini (Atiq et al., 2025).

Salah satu sumber utama ketegangan dalam hubungan Tiongkok dan Taiwan adalah perbedaan pandangan mengenai status politik Taiwan. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui prinsip *One China Principle* menyatakan bahwa hanya terdapat satu Tiongkok di dunia dan Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Tiongkok. Berdasarkan prinsip tersebut, pemerintah Tiongkok secara konsisten menolak segala bentuk pengakuan internasional terhadap Taiwan sebagai negara yang merdeka dan menegaskan bahwa reunifikasi merupakan tujuan nasional yang harus dicapai. Wachman (2007) berpendapat bahwa Taiwan merupakan isu yang sangat penting bagi Tiongkok karena berkaitan dengan upaya menjaga integritas teritorial sekaligus mempertahankan legitimasi politik negara.

Di sisi lain, Taiwan yang secara resmi bernama *Republic of China* (ROC) memiliki pemerintahan, sistem politik, militer, dan konstitusi yang berjalan secara terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok sejak berakhirnya Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949. Meskipun sebagian besar negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, pulau tersebut tetap menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara *de facto* dan mempertahankan identitas politik yang berbeda dari Tiongkok daratan. Rigger (2011) menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi di Taiwan semakin memperkuat identitas politik masyarakat Taiwan yang berbeda dengan identitas nasional Tiongkok.

Perbedaan pandangan mengenai status politik Taiwan tersebut menciptakan ambiguitas yang terus menjadi sumber konflik dalam hubungan lintas selat. Bagi Tiongkok, Taiwan merupakan provinsi yang belum direunifikasi, sedangkan bagi sebagian besar masyarakat Taiwan, pulau tersebut memiliki sistem politik dan identitas yang berbeda dari Tiongkok daratan. Oleh karena itu, persoalan status politik Taiwan menjadi fondasi utama yang melatarbelakangi berbagai ketegangan politik dan keamanan antara kedua pihak hingga saat ini.

2.1.2 Interdependensi Ekonomi Tiongkok–Taiwan

Pada tahun 2025, meskipun ketegangan politik antara Tiongkok dan Taiwan meningkat, hubungan ekonomi lintas selat justru menunjukkan pertumbuhan signifikan hal ini ditandai dengan perdagangan lintas selat mencapai lebih dari USD 285 miliar (naik 7,3% dibanding tahun sebelumnya), dengan lebih dari 6.423 perusahaan baru Taiwan didirikan di daratan Tiongkok dan investasi Taiwan meningkat 53% (Global Times, 2026). Fakta ini menegaskan bahwa interdependensi ekonomi tetap menjadi fondasi penting dalam dinamika hubungan kedua aktor.

Meskipun ketegangan politik semakin tajam, hubungan dagang lintas selat tetap krusial pada tahun 2025. Hal ini ditandai dengan ekspor Taiwan ke daratan Tiongkok dan Hong Kong mencapai US$170,5 miliar, meningkat 13,2% setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan. Proporsi ekspor Taiwan ke Tiongkok dan Hong Kong memang menurun dari 43,9% pada 2020 menjadi 26,6% pada 2025, menandakan adanya diversifikasi pasar ke Amerika Serikat dan Asia Tenggara (Kyodo News International, 2026). Namun, angka tersebut tetap

menegaskan bahwa Tiongkok masih menjadi mitra dagang utama bagi Taiwan. Fenomena ini memperlihatkan Taiwan menghadapi tekanan politik dari Beijing, tetapi tetap bergantung pada pasar Tiongkok sebagai mitra dagang strategis.

Interdependensi ekonomi lintas selat tidak hanya soal angka perdagangan, tetapi juga soal keterikatan struktural dalam rantai pasok global. Meskipun retorika politik semakin keras, hubungan dagang tetap berjalan karena kedua pihak memiliki kepentingan ekonomi yang saling mengikat (Atiq et al., 2025).

Selain perdagangan, investasi Taiwan di Tiongkok telah lama menjadi fondasi penting hubungan ekonomi lintas selat sejak 1990-an. Namun tren pada tahun 2025 menunjukkan pergeseran yang signifikan. Data Ministry of Economic Affairs (MOEA) mencatat bahwa investasi Taiwan ke daratan Tiongkok yang disetujui sepanjang Januari-November 2025 hanya US$1,39 miliar dari 228 aplikasi, turun 61,3% dibanding 2024 (Ministry of Economic Affairs Taiwan, 2026). Penurunan ini mencerminkan strategi diversifikasi Taiwan melalui kebijakan *New Southbound Policy* (NSP), yang mendorong ekspansi ke Asia Tenggara, India, dan Australia. Banyak perusahaan Taiwan mulai memindahkan basis produksi ke Vietnam dan Indonesia untuk mengurangi risiko politik di Tiongkok.

NSP merupakan bentuk strategi keamanan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Tiongkok, dengan tujuan memperluas jaringan perdagangan ke Asia Tenggara dan memperkuat posisi Taiwan dalam forum multilateral (S. Liu, 2019). Meskipun terdapat ribuan perusahaan Taiwan yang masih beroperasi di Tiongkok, tren penurunan investasi memperlihatkan bahwa

interdependensi ekonomi mulai bergeser di mana perdagangan tetap tinggi, tetapi dalam konteks investasi baru semakin berhati-hati.

Perusahaan manufaktur elektronik asal Taiwan seperti Foxconn/Hon Hai, Pegatron, Quanta, dan Compal telah menjadi tulang punggung model produksi Tiongkok, terutama dalam perakitan produk elektronik global. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat mesin ekspor Tiongkok, tetapi juga menunjukkan betapa eratnya interdependensi lintas selat dalam sektor teknologi. Setidaknya lebih dari 90% laptop dunia pernah diproduksi oleh perusahaan Taiwan, sebagian besar di Tiongkok, sehingga keberadaan mereka menjadi faktor kunci dalam rantai pasok (S.-C. Chen et al., 2021). Selain itu, perusahaan elektronik Taiwan di Tiongkok juga mengadopsi model integrasi vertikal dan modularisasi produksi, yang memungkinkan mereka menguasai seluruh rantai nilai mulai dari manufaktur hingga distribusi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Taiwan tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pengembangan jaringan produksi Tiongkok (S. Chen et al., 2021).

Dimensi paling strategis dari interdependensi ini adalah semikonduktor. Taiwan, melalui TSMC, memproduksi lebih dari 90% chip paling canggih di dunia, menjadikannya pusat rantai pasok global. Laporan TSMC tahun 2025 mencatat bahwa perusahaan melayani 534 pelanggan dan memproduksi 12.682 produk untuk berbagai aplikasi mulai dari HPC, smartphone, IoT, otomotif, hingga elektronik konsumen. Liao (2025) menekankan bahwa TSMC bukan sekadar produsen teknologi, tetapi juga aktor geopolitik yang berfungsi sebagai “perisai silikon” bagi

Taiwan, karena keberadaannya menavigasi fragmentasi rantai pasok dan tekanan kebijakan negara besar (Liao, 2025).

Interdependensi lintas selat ini bersifat dua arah. Taiwan memang bergantung pada pasar dan basis produksi Tiongkok, tetapi Tiongkok juga semakin bergantung pada teknologi, modal, dan perusahaan Taiwan. Liu & Lin (2025) menegaskan bahwa Taiwan adalah "chokepoint economy" dalam rantai pasok global, karena chip canggih yang diproduksi TSMC menjadi vital bagi AI, 5G, dan sistem pertahanan modern (Liu, Han-Wei; Lin, 2025). Pada kenyatannya ketergantungan berjalan dua arah, di mana ekspor Taiwan ke Tiongkok menopang pertumbuhan ekonomi Taiwan, sementara Tiongkok semakin bergantung pada perusahaan elektronik dan semikonduktor Taiwan untuk menopang industrinya (Mark & Graham, 2023).

Dengan demikian, interdependensi ekonomi Tiongkok-Taiwan bersifat dua arah. Taiwan masih memiliki keterikatan dengan pasar, investasi, dan basis produksi di Tiongkok, sementara Tiongkok juga memperoleh manfaat dari modal, teknologi, perusahaan, dan rantai pasok Taiwan. Akan tetapi, keterikatan ekonomi tersebut tidak menghapus konflik politik yang berakar pada persoalan kedaulatan, identitas, dan keamanan. Justru, hubungan ekonomi yang saling bergantung ini memperkuat karakter paradoks hubungan Tiongkok-Taiwan yang dapat dimaknai secara ekonomi keduanya saling membutuhkan, tetapi secara politik tetap saling mencurigai.

2.1.3 Ketegangan Politik dan Militer Tiongkok–Taiwan

Kontras antara hubungan ekonomi dan politik terlihat jelas di mana pada sisi yang berbeda perdagangan dan investasi lintas selat menunjukkan keterikatan yang mendalam, tetapi di sisi lainnya hubungan politik-keamanan justru diwarnai kecurigaan dan ancaman. Interdependensi ekonomi tidak secara otomatis menciptakan perdamaian, melainkan berdampingan dengan pola ketegangan militer yang semakin intens di Selat Taiwan.

Posisi Beijing terhadap Taiwan didasarkan pada pandangan bahwa reunifikasi merupakan tujuan nasional yang tidak dapat ditawar. Tiongkok dengan tegas menekankan dan mengupayakan reunifikasi damai, tetapi tetap mempertahankan opsi penggunaan *"all necessary measures"* bila Taiwan melangkah menuju kemerdekaan atau jika ada intervensi eksternal yang dianggap mengancam kedaulatan Tiongkok (State Council People's Republic of China, 2022). Dengan demikian, ancaman reunifikasi bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi politik jangka panjang Beijing yang menempatkan Taiwan sebagai inti dari proyek kebangkitan nasional.

Ancaman reunifikasi didukung oleh modernisasi militer yang masif. Menurut laporan yang dirilis melalui Pentagon, PLA diarahkan untuk memiliki kemampuan militer yang memadai dalam menghadapi kontingensi Taiwan pada 2027. Modernisasi ini mencakup peningkatan kemampuan rudal jarak jauh, operasi amfibi, blokade maritim, serta penguatan kapasitas siber dan luar angkasa. PLA juga dinilai berupaya mencapai *"strategic decisive victory"* atas Taiwan dan *"strategic counterbalance"* terhadap Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik

(Korda, 2026). Dengan kata lain, modernisasi PLA bukan hanya untuk memperkuat pertahanan, tetapi juga untuk menciptakan tekanan militer yang dapat memaksa Taiwan bernegosiasi sesuai syarat Beijing.

Ketegangan politik dan militer ini tercermin dalam aktivitas harian di Selat Taiwan. Hal ini ditandai dengan Beijing yang semakin intens melakukan aktivitas militer di sekitar Taiwan, termasuk latihan gabungan PLA dan peningkatan penerbangan militer ke ADIZ Taiwan, sementara Taiwan merespons dengan memperkuat strategi pertahanan berlapis dan meningkatkan anggaran militer hingga lebih dari 3% PDB (Caloca, 2025). Selain itu, Tiongkok juga memiliki manuver politik lainnya yang disebut sebagai *"gray zone tactics"*. Dalam hal ini, Tiongkok melakukannya melalui patroli harian, operasi drone, dan pelanggaran garis median Selat Taiwan yang bertujuan melemahkan kesiapan militer Taiwan dan menciptakan tekanan psikologis jangka panjang yang dirancang untuk mengikis ketahanan Taiwan tanpa harus memicu konflik terbuka (Congressional Research Service, 2025).

Perbandingan antara keterikatan ekonomi dan ketegangan politik semakin nyata apabila dilihat melalui aktivitas militer di zona identifikasi pertahanan udara Taiwan (ADIZ). Meskipun demikian, ADIZ bukanlah wilayah udara kedaulatan, melainkan zona yang ditetapkan untuk tujuan identifikasi dan keamanan. ADIZ dalam hal ini memiliki status hukum internasional yang ambigu, sehingga aktivitas militer Tiongkok di area ini tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran wilayah udara Taiwan. Namun, intensitas patroli dan masuknya pesawat PLA ke ADIZ Taiwan secara rutin menciptakan tekanan psikologis bagi

Taipei dan menuntut kesiagaan militer yang berkelanjutan (Asia Maritime Transparency Initiative, 2024). Dengan demikian, ADIZ menjadi arena *"gray zone tactics"* yang digunakan Beijing untuk melemahkan kesiapan Taiwan tanpa memicu eskalasi secara langsung.

Aktivitas PLA di ADIZ dan sekitar Selat Taiwan memperlihatkan pola ketegangan keamanan yang sistematis. CRS mencatat bahwa latihan militer Tiongkok di sekitar Selat Taiwan semakin sering dilakukan dengan skenario blokade maritim, operasi amfibi, dan simulasi serangan rudal. Pola ini bukan hanya latihan rutin, melainkan strategi untuk menguras kesiagaan Taiwan, meningkatkan risiko salah kalkulasi, dan menegaskan klaim Beijing atas kedaulatan Taiwan (Congressional Research Service, 2025). Selat Taiwan pun berubah menjadi titik rawan keamanan Indo-Pasifik, di mana setiap insiden kecil berpotensi memicu eskalasi regional.

Dengan demikian, subbab ini menegaskan bahwa ketegangan politik dan militer adalah sisi *hate* dari hubungan Tiongkok-Taiwan. Interdependensi ekonomi memang dengan jelas memperlihatkan keterikatan yang erat, tetapi disaat yang bersamaan Beijing menegaskan klaim reunifikasi dengan dukungan modernisasi militer PLA dan aktivitas intensif di ADIZ. Pola ancaman, latihan militer, dan *"gray zone tactics"* menunjukkan bahwa konflik lintas selat bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga pertarungan politik dan keamanan yang berisiko eskalasi. Posisi kedua aktor berada pada kondisi ekonomi yang saling membutuhkan, tetapi politik tetap saling mencurigai. Kedua kondisi kontras tersebut menjadikan Selat Taiwan sebagai salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik kedua aktor.

2.2 Peran dan Kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan

Subbab 2.1 membahas mengenai dinamika antara Tiongkok dan Taiwan menunjukkan bahwa konflik lintas selat tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan kedua pihak secara langsung, tetapi juga oleh keterlibatan aktor eksternal yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dalam subbab ini, Amerika Serikat menjadi aktor penting karena posisinya tidak dapat dilepaskan dari status politik Taiwan, keseimbangan kekuatan regional, serta rivalitas strategis dengan Tiongkok. Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, Washington tetap mempertahankan hubungan tidak resmi, dukungan keamanan, dan kepentingan ekonomi yang menjadikan isu Taiwan sebagai bagian penting dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Oleh karena itu, setelah memahami dinamika konflik Tiongkok-Taiwan, subbab ini akan membahas bagaimana peran dan kepentingan Amerika Serikat terbentuk dalam konflik tersebut.

2.2.1 *Taiwan Relations Act* dan Hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan

Pada tahun 1979, Amerika Serikat secara resmi mengalihkan pengakuan diplomatik dari Republik Tiongkok (Taiwan) ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Normalisasi ini merupakan bagian dari strategi global AS untuk mengintegrasikan Beijing ke dalam sistem internasional pasca-Perang Dingin. Namun, keputusan tersebut menimbulkan dilema, yaitu “bagaimana menjaga hubungan dengan Taiwan tanpa status diplomatik resmi?” Untuk menjawab dilema tersebut, Kongres AS melahirkan Taiwan Relations Act (TRA) sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan kelanjutan hubungan komersial, budaya, dan keamanan dengan

Taiwan. TRA menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik adalah kepentingan strategis AS, sehingga meskipun pengakuan diplomatik dialihkan, keterlibatan AS tidak pernah benar-benar berakhir (Taiwan Relations Act, 1979).

Lahirnya TRA mencerminkan unilateralisme Kongres AS dalam menghadapi dilema Taiwan. (Landers, 2024) menjelaskan bahwa TRA memperkuat kebijakan *"strategic ambiguity"* AS, yaitu menjaga hubungan dengan Taiwan tanpa pengakuan diplomatik resmi, sekaligus mengirim sinyal kepada Beijing bahwa setiap perubahan status Taiwan harus dilakukan secara damai. Landers menekankan bahwa TRA menjadi contoh bagaimana hukum domestik AS digunakan untuk mengatur hubungan internasional secara tidak resmi, sehingga Taiwan tetap memiliki "status khusus" dalam kebijakan luar negeri AS (Landers, 2024).

Dalam sektor keamanan, Taiwan Relations Act menjadi dasar penting bagi keberlanjutan hubungan pertahanan tidak resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan. Setelah berakhirnya hubungan pertahanan formal AS-ROC dan normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok, dukungan Kongres AS melalui TRA terhadap penjualan senjata berkelanjutan menjadi faktor keamanan yang penting bagi Taiwan (Chin, John J.; Rector, 2025). Dalam konteks ini, penjualan senjata tidak hanya berfungsi sebagai transaksi militer, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk menjaga kemampuan pertahanan diri Taiwan di tengah meningkatnya tekanan Tiongkok. (Glaser, 2025) juga menyampaikan terdapat konsensus di kalangan pakar bahwa Taiwan perlu

memperkuat strategi pertahanan asimetris untuk mencegah atau menghambat kemungkinan invasi Tiongkok, dan dukungan Amerika Serikat melalui penyediaan senjata menjadi bagian penting dari strategi tersebut (Glaser, 2025). Pada Juni 2025 *backlog* penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taiwan masih mencapai sekitar US$21,54 miliar, yang mencakup berbagai sistem pertahanan seperti F-16 Block 70, HIMARS, dan sejumlah persenjataan lain yang berkaitan dengan kemampuan defensif dan asimetris Taiwan (Gomez, 2025). Dengan demikian, komitmen keamanan Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan melalui dukungan material yang bertujuan memperkuat kapasitas *self-defense* Taiwan dalam menghadapi tekanan militer Tiongkok.

Relevansi *Taiwan Relations Act* dalam politik kontemporer terlihat dari berlanjutnya dukungan politik Amerika Serikat terhadap Taiwan, khususnya melalui Kongres. TRA tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum hubungan tidak resmi AS-Taiwan, tetapi juga menjadi dasar politik bagi dukungan keamanan yang terus dipertahankan lintas pemerintahan. Dukungan legislator Amerika Serikat terhadap Taiwan dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap Tiongkok sebagai ancaman keamanan, sehingga semakin kuat persepsi ancaman terhadap Tiongkok, semakin besar pula kecenderungan legislator untuk mendukung rancangan undang-undang dan resolusi yang berpihak pada Taiwan (G. Wang, 2024). Dalam tulisannya, Wang menegaskan bahwa dukungan terhadap Taiwan tidak hanya dibentuk oleh norma hukum TRA, tetapi juga oleh dinamika politik domestik Amerika Serikat yang melihat isu Taiwan sebagai bagian dari persaingan strategis dengan Tiongkok. Dengan demikian, TRA tetap relevan hingga kini

karena menjadi fondasi bagi hubungan keamanan AS–Taiwan sekaligus instrumen politik yang memungkinkan Washington mempertahankan keterlibatannya dalam isu Taiwan tanpa membentuk hubungan diplomatik resmi maupun aliansi militer formal.

Dengan demikian, *Taiwan Relations Act* menjadi dasar utama yang menjelaskan mengapa Amerika Serikat tetap memiliki keterlibatan penting dalam isu Taiwan meskipun tidak lagi memiliki hubungan diplomatik resmi. TRA memungkinkan Washington menjaga hubungan tidak resmi, mempertahankan dukungan keamanan, serta memberikan ruang bagi penjualan senjata defensif kepada Taiwan. Oleh karena itu, hubungan AS-Taiwan tidak dapat dipahami sebagai hubungan diplomatik formal, tetapi sebagai hubungan strategis yang dibangun melalui mekanisme hukum, politik domestik, dan kepentingan keamanan regional. Kerangka inilah yang kemudian berkaitan erat dengan kebijakan *One China Policy* dan *strategic ambiguity* Amerika Serikat dalam menghadapi dinamika Tiongkok-Taiwan.

2.2.2 *One China Policy* dan *Strategic Ambiguity*

Setelah *Taiwan Relations Act* menjadi dasar hubungan tidak resmi Amerika Serikat dengan Taiwan, kebijakan Amerika Serikat terhadap isu Taiwan juga dibentuk oleh kerangka *One China Policy* dan *strategic ambiguity*. Kedua konsep ini penting karena menjelaskan bagaimana Amerika Serikat dapat mempertahankan hubungan keamanan dan ekonomi dengan Taiwan tanpa memberikan pengakuan diplomatik resmi. *One China framework* berkembang sebagai institusi informal dalam politik internasional yang bersifat fleksibel dan ambigu (Liff & Lin, 2022).

Ambiguitas tersebut pada awalnya memungkinkan terjadinya normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, tetapi pada saat yang sama juga meninggalkan ruang tafsir yang terus menjadi sumber ketegangan hingga sekarang.

Perbedaan antara *One China Principle* dan *One China Policy* menjadi hal penting dalam memahami posisi Amerika Serikat. *One China Principle* merupakan posisi Beijing yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok dan Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Sebaliknya, *One China Policy* yang dianut Amerika Serikat tidak sepenuhnya identik dengan klaim Beijing tersebut. Posisi Amerika Serikat tidak pernah mengakui kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok atas Taiwan, meskipun Washington mengakui Beijing sebagai satu-satunya pemerintah Tiongkok (Hsieh, 2009). Pada kenyataannya, "*one China policies*" yang dianut banyak aktor internasional umumnya hanya mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai pemerintah resmi Tiongkok, tetapi tidak selalu menerima klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan (Brown, 2022). Dengan demikian, *One China Policy* memberi ruang bagi Amerika Serikat untuk tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi tetap mempertahankan hubungan tidak resmi melalui perdagangan, kerja sama budaya, dan dukungan keamanan.

Dalam kerangka tersebut, *strategic ambiguity* menjadi salah satu ciri utama kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan. *Strategic ambiguity* merujuk pada sikap Amerika Serikat yang sengaja tidak menjelaskan secara pasti apakah Washington akan melakukan intervensi militer apabila Tiongkok menyerang

Taiwan. Dalam konteks tersebut, ambiguitas dapat memiliki fungsi ganda, yaitu mencegah Tiongkok menggunakan kekuatan terhadap Taiwan sekaligus mencegah Taiwan mengambil langkah provokatif seperti deklarasi kemerdekaan formal yang dapat memicu respons militer Beijing (T. Y. Wang, 2025). Dengan kata lain, *strategic ambiguity* tidak hanya diarahkan kepada Tiongkok sebagai bentuk *deterrence*, tetapi juga kepada Taiwan sebagai bentuk *restraint* agar *status quo* lintas selat tetap terjaga.

Maka dari itu, alasan Amerika Serikat mempertahankan kebijakan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas kawasan dan fleksibilitas strategis. Jika Amerika Serikat memberikan jaminan pertahanan yang terlalu jelas kepada Taiwan, hal itu dapat mendorong ekspektasi berlebihan di Taiwan dan memperbesar risiko tindakan sepihak yang dianggap provokatif oleh Beijing. Namun, jika Amerika Serikat terlalu lemah atau terlalu jelas menyatakan tidak akan membantu Taiwan, hal itu dapat menurunkan efek deterrence terhadap Tiongkok. Karena itu, strategic ambiguity dipertahankan sebagai jalan tengah untuk menjaga status quo, mengurangi risiko eskalasi, sekaligus mempertahankan ruang gerak Amerika Serikat dalam menghadapi krisis lintas selat. Dalam tulisan (T. Y. Wang, 2025), ia juga menekankan bahwa *strategic ambiguity* masih penting bagi perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan, meskipun tekanan dari kebangkitan Tiongkok dan perubahan politik Amerika Serikat membuat kebijakan ini perlu terus dikalibrasi.

Dengan demikian, *One China Policy* dan *strategic ambiguity* menjadi dua kerangka utama yang menjelaskan posisi Amerika Serikat dalam isu Taiwan. *One*

China Policy memungkinkan Washington menjalin hubungan dengan Beijing tanpa sepenuhnya menerima klaim kedaulatan Tiongkok atas Taiwan, sedangkan strategic ambiguity memungkinkan Amerika Serikat mendukung pertahanan Taiwan tanpa memberikan jaminan intervensi militer otomatis. Kerangka ini memperlihatkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Tiongkok-Taiwan tidak bersifat sederhana, melainkan dibangun melalui kombinasi pengakuan diplomatik terhadap Beijing, hubungan tidak resmi dengan Taiwan, dukungan pertahanan, dan ambiguitas strategis. Kerangka tersebut sekaligus menjadi dasar untuk memahami kepentingan Amerika Serikat yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik.

2.2.3 Kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasifik

Kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Setelah *One China Policy* dan *strategic ambiguity* memberi kerangka diplomatik bagi hubungan AS-Taiwan, Indo-Pasifik turut menjadi ruang geopolitik yang menjelaskan mengapa isu Taiwan tetap penting bagi Washington. Kawasan ini merupakan salah satu pusat utama perdagangan global, jalur pelayaran internasional, pertumbuhan ekonomi, serta persaingan kekuatan besar. Keamanan *Sea Lines of Communication* atau SLOCs di Indo-Pasifik merupakan inti dari kepentingan maritim Amerika Serikat, karena jalur laut tersebut menghubungkan Amerika Serikat dengan sekutu dan mitra ekonominya di Samudra Hindia dan Pasifik (Bradford, 2011). Dengan demikian, stabilitas Indo-Pasifik bukan hanya persoalan regional, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat.

Kepentingan Amerika Serikat di Indo-Pasifik juga berkaitan dengan keamanan kawasan. Indo-Pasifik menjadi arena yang semakin penting karena meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok, serta bertambahnya kompetisi antara negara-negara besar di kawasan tersebut. Indo-Pasifik memperoleh perhatian besar dalam isu keamanan maritim karena adanya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, meningkatnya peran India, serta keterlibatan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga stabilitas kawasan (Tertia, Joseph; Perwita, 2018). Dalam konteks ini, Amerika Serikat berkepentingan untuk mempertahankan kebebasan navigasi, stabilitas jalur perdagangan, serta mencegah munculnya dominasi tunggal oleh satu kekuatan besar, terutama Tiongkok.

Taiwan memiliki posisi strategis dalam kepentingan Amerika Serikat di Indo-Pasifik karena letaknya berada di titik penting antara Laut Tiongkok Timur, Laut Tiongkok Selatan, dan Samudra Pasifik Barat. Posisi ini membuat Taiwan sering dipahami sebagai bagian penting dari first island chain, yaitu rangkaian wilayah strategis yang membentang dari Jepang, Taiwan, Filipina, hingga Asia Tenggara. Taiwan tidak hanya menghadapi keterbatasan diplomatik akibat status politiknya yang ambigu, tetapi juga berupaya memosisikan diri sebagai aktor penting dalam Indo-Pasifik melalui kebijakan luar negeri dan hubungan ekonomi kawasan (Scott, 2019). Oleh karena itu, posisi Taiwan bagi Amerika Serikat tidak hanya terkait dengan isu demokrasi atau hubungan bilateral, tetapi juga dengan keseimbangan kekuatan dan akses strategis di Pasifik Barat.

Selain faktor keamanan, Taiwan juga memiliki nilai ekonomi dan geopolitik yang signifikan bagi Amerika Serikat. Selat Taiwan merupakan jalur penting bagi perdagangan internasional dan konektivitas ekonomi Asia Timur. Setidaknya, lebih dari seperlima perdagangan maritim dunia melewati Selat Taiwan, sehingga gangguan di wilayah tersebut dapat berdampak luas terhadap perdagangan global (Asia Maritime Transparency Initiative, 2024). Di sisi lain, Taiwan juga memiliki posisi penting dalam rantai pasok teknologi global, terutama melalui industri semikonduktor. Ketergantungan global terhadap komponen Taiwan, khususnya semikonduktor, menjadikan Taiwan sebagai bagian penting dari rantai pasok Indo-Pasifik. Dengan demikian, kepentingan Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak hanya didasarkan pada kalkulasi militer, tetapi juga pada perlindungan terhadap stabilitas perdagangan, teknologi, dan ekonomi global (Nagy, 2024).

Dengan demikian, kepentingan Amerika Serikat di Indo-Pasifik mencakup dimensi perdagangan, keamanan kawasan, posisi strategis Taiwan, serta kepentingan ekonomi dan geopolitik yang lebih luas. Taiwan menjadi penting karena berada di persimpangan antara jalur pelayaran, persaingan kekuatan besar, dan rantai pasok teknologi global. Oleh karena itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam isu Taiwan tidak dapat dipahami hanya sebagai konsekuensi dari *Taiwan Relations Act* atau *strategic ambiguity*, tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Pembahasan ini kemudian mengantar pada subbab berikutnya mengenai bagaimana Amerika Serikat berupaya menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan.

2.2.4 Amerika Serikat dan Upaya Menyeimbangkan Pengaruh Tiongkok

Keterlibatan Amerika Serikat dalam isu Taiwan tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Bangkitnya dan kembali kuatnya Tiongkok sebagai sebuah negara tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kapasitas militer, pengaruh diplomatik, dan ambisi geopolitiknya di Asia Timur. Kebangkitan Tiongkok sebagai *emerging power* berpotensi menjadi tantangan bagi posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dalam tatanan internasional (Zarkachi, 2023). Dalam konteks Indo-Pasifik, peningkatan kekuatan Tiongkok membuat Amerika Serikat melihat kawasan ini sebagai arena penting untuk mempertahankan pengaruh strategisnya. Oleh karena itu, isu Taiwan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari persaingan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dalam perspektif *balance of power*, Amerika Serikat berupaya mencegah dominasi tunggal Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertahankan jaringan aliansi, memperkuat kerja sama keamanan dengan mitra kawasan, menjaga kebebasan navigasi, serta mendukung status quo di Selat Taiwan. Adapun perubahan keseimbangan kekuatan yang terjadi di Selat Taiwan mendorong Amerika Serikat untuk menyesuaikan kebijakan *strategic ambiguity* agar tetap mampu mencegah Tiongkok menggunakan kekuatan, sekaligus menghindari eskalasi langsung (Majd & Sajjadpour, 2024). Dengan demikian, kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan dapat dipahami sebagai bagian dari strategi penyeimbangan, yaitu menjaga agar peningkatan kekuatan Tiongkok tidak mengubah struktur keamanan regional secara sepihak.

Taiwan menempati posisi penting dalam strategi Amerika Serikat menghadapi Tiongkok karena memiliki nilai strategis, geografis, ekonomi, dan teknologi. Secara geografis, Taiwan berada di posisi penting dalam first island chain yang menghubungkan Jepang, Taiwan, Filipina, dan Asia Tenggara. Secara ekonomi dan teknologi, Taiwan memiliki peran penting dalam rantai pasok global, terutama melalui industri semikonduktor. Dalam hal ini *status quo* Taiwan memiliki peran penting dalam kompetisi kekuatan antara Washington dan Beijing karena nilai geografis, militer, ekonomi, dan teknologi Taiwan dapat memengaruhi distribusi kekuatan regional maupun internasional (Campagnola, 2024). Dalam tulisan (Chang, 2023) ia menyatakan bahwa strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat akan kehilangan makna apabila Washington tidak mampu mencegah Tiongkok menyerang Taiwan dan mengubah tatanan regional secara paksa.

Dengan demikian, dalam konteks posisi Amerika Serikat, ia tidak dapat dipahami sebagai aktor yang sepenuhnya netral dalam konflik Tiongkok-Taiwan. Meskipun Washington tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan tetap mempertahankan *One China Policy*, Amerika Serikat memiliki kepentingan langsung dalam menjaga *status quo*, mencegah penggunaan kekuatan oleh Tiongkok, mempertahankan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, serta melindungi kepentingan ekonomi dan teknologi global. Ketidaknetralan Amerika Serikat terlihat dari keberlanjutan hubungan tidak resmi dengan Taiwan, dukungan keamanan melalui *Taiwan Relations A*ct, kebijakan *strategic ambiguity*, dan penempatan Taiwan sebagai bagian dari strategi penyeimbangan terhadap Tiongkok. Oleh karena itu, peran Amerika Serikat dalam konflik Tiongkok-Taiwan

bukan hanya didorong oleh komitmen terhadap Taiwan, tetapi juga oleh kepentingan strategis untuk membatasi perluasan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

2.3 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Konflik Tiongkok–Taiwan pada Masa Donald Trump

Subbab sebelumnya menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis dalam menjaga *status quo* Taiwan dan menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, subbab ini akan membahas bagaimana kepentingan tersebut diaplikasikan ke dalam kebijakan luar negeri pada masa Donald Trump. Pembahasan mengenai kebijakan Trump penting karena pemerintahannya menunjukkan perubahan gaya yang lebih konfrontatif, transaksional, dan terbuka dalam menghadapi Tiongkok dibandingkan beberapa pemerintahan sebelumnya. Dalam konteks Taiwan, pemerintahan Trump periode pertama tidak keluar secara formal dari *One China Policy*, tetapi menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan dukungan politik, keamanan, dan diplomatik terhadap Taiwan. Pola tersebut terlihat melalui pengesahan *Taiwan Travel Act*, peningkatan penjualan senjata, kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat ke Taiwan, serta perang dagang dengan Tiongkok. Oleh karena itu, subbab ini tidak hanya menjelaskan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan dan Tiongkok, tetapi juga memperlihatkan pola dasar pendekatan Trump yang berujung pada analisis lebih lanjut melalui *Leadership Trait Analysis* pada Bab III.

2.3.1 Kebijakan Donald Trump terhadap Taiwan pada Periode Pertama (2017-2021)

Pada periode pertama pemerintahannya, Donald Trump telah memperlihatkan kecenderungan untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan secara lebih terbuka dibandingkan beberapa pemerintahan sebelumnya. Diawali dengan terjadinya percakapan diplomarik bersejarah antara Presiden terpilih Donald Trump dan Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen yang berlangsung selama 10 menit pada tangga; 2 desember 2016. Peristiwa ini memicu perdebatan global karena menjadi komunikasi langsung pertama antara presiden terpilih AS dengan pemimpin taiwan sejak hubungan diplomatik resmi kedua negara diputus pada tahun 1979. (*Office of Teh President Republic of China (Taiwan),* 2016). Sejak dari panggilan resmi nan singkat inilah hubungan antara Amerika Serikat - Taiwan semakin kuat dan berkembang meskipun masih mempertahankan *One China Policy.*

Kemudiam pemerintahan Trump mengambil sejumlah kebijakan yang memperluas ruang hubungan tidak resmi AS-Taiwan. Salah satu langkah penting adalah penandatanganan *Taiwan Travel Act* pada Maret 2018. Undang-undang ini mendorong kunjungan pejabat Amerika Serikat dan Taiwan pada semua tingkatan, sehingga membuka ruang interaksi politik yang lebih luas di luar hubungan diplomatik formal. *Taiwan Travel Act* menjadi simbol penting dalam peningkatan hubungan AS-Taiwan karena undang-undang tersebut secara eksplisit mendorong hubungan pejabat tingkat tinggi antara kedua pihak (Wees, 2018). Namun

efektivitas *Taiwan Travel Act* tetap bergantung pada sejauh mana pemerintahan Trump benar-benar menggunakannya dalam praktik diplomatik (Shattuck, 2018).

Selain melalui *Taiwan Travel Act*, pemerintahan Trump juga meningkatkan dukungan keamanan terhadap Taiwan melalui penjualan senjata. Penjualan senjata menjadi instrumen penting karena tetap berada dalam kerangka *Taiwan Relations Act*, tetapi pada masa Trump jumlah dan intensitasnya meningkat secara signifikan. Selama masa jabatan pertamanya, Trump mengotorisasi sekitar US$18,3 miliar penjualan senjata kepada Taiwan. Angka ini menunjukkan bahwa dukungan keamanan Trump terhadap Taiwan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan dalam penguatan kemampuan pertahanan Taiwan (Ali, 2026b). Dukungan tersebut meliputi berbagai sistem pertahanan yang diarahkan untuk memperkuat kemampuan *self-defense* dan *deterrence* Taiwan di tengah meningkatnya tekanan militer Tiongkok.

Pemerintahan Trump juga memperlihatkan peningkatan hubungan diplomatik tidak resmi dengan Taiwan melalui kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Alex Azar melakukan kunjungan ke Taiwan dan menjadi pejabat kabinet AS dengan tingkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak 1979. Kunjungan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump bersedia menaikkan level interaksi politik dengan Taiwan, terutama dalam konteks kerja sama kesehatan dan respons pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Taiwan dapat melihat dan menilai pemerintahan Trump sebagai periode yang memperluas ruang hubungan AS-Taiwan, terutama melalui peningkatan kerja sama keamanan, kunjungan pejabat

tinggi, dan dukungan politik yang lebih terlihat (Tyler, 2021). Dengan demikian, hubungan AS-Taiwan pada masa Trump tidak hanya diperkuat melalui instrumen militer, tetapi juga melalui peningkatan kontak politik dan simbol diplomatik.

Pada sisi lainnya, kebijakan Trump terhadap Taiwan tidak dapat dipisahkan dari pendekatan konfrontatifnya terhadap Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh perang dagang AS-Tiongkok yang dimulai pada 2018 yang memperlihatkan perubahan strategi Amerika Serikat dari pendekatan *engagement* menuju tekanan ekonomi yang lebih keras terhadap Beijing. Kebijakan luar biasa Amerika Serikat dengan meningkatkan tarif terhadap ribuan produk Tiongkok pada 2018-2019, hingga menargetkan sekitar US$350 miliar impor dari Tiongkok (Fajgelbaum, 2021). Pada tahun 2018 Trump memberlakukan tarif 25% terhadap sekitar US$50 miliar impor Tiongkok dan kemudian menaikkan tarif dari 10% menjadi 25% terhadap tambahan US$200 miliar impor Tiongkok pada 2019 (Bown, 2019). Kebijakan ini menunjukkan bahwa isu Taiwan berada dalam konteks persaingan AS-Tiongkok yang lebih luas, di mana Trump menggunakan tekanan ekonomi untuk membatasi pengaruh Tiongkok dan menegosiasikan ulang posisi Amerika Serikat dalam hubungan bilateral.

Tabel 2.1
Timeline Kebijakan Trump terhadap Taiwan dan Tiongkok 2017-2021

Tahun	Kebijakan
2016	Awal kembalinya hubungan diplomatik resmi antara AS-Taiwan melalui panggilan telponm“Trump-Tsai Call”
2017	Awal pemerintahan Trump, pendekatan lebih keras terhadap Tiongkok mulai terlihat.
2018	Pengesahan Taiwan Travel Act.
2018-2019	Trade war AS–Tiongkok meningkat melalui tarif impor.
2019	TAIPEI Act disahkan/dorongan dukungan internasional untuk Taiwan.
2020	Kunjungan Alex Azar ke Taiwan sebagai pejabat kabinet AS tertinggi sejak 1979.
2017-2021	Penjualan senjata AS ke Taiwan meningkat dan menjadi instrumen dukungan keamanan.

Sumber: diolah oleh penulis dibantu berbagai sumber lainnya.

Dengan demikian, kebijakan Donald Trump terhadap Taiwan pada periode pertama menunjukkan pola dasar yang penting bagi penelitian ini. Trump tidak secara formal meninggalkan *One China Policy*, tetapi pemerintahannya memperluas dukungan terhadap Taiwan melalui *Taiwan Travel Act*, peningkatan penjualan senjata, kunjungan pejabat tinggi, dan penguatan kerja sama tidak resmi. Pada saat yang sama, perang dagang terhadap Tiongkok menunjukkan bahwa kebijakan Taiwan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menekan dan menyeimbangkan pengaruh Tiongkok. Pola ini memperlihatkan kecenderungan Trump untuk menggunakan kombinasi dukungan keamanan, simbol diplomatik, dan tekanan ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Pola tersebut menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana kebijakan Trump pada periode kedua tahun 2025 dapat memengaruhi dinamika Hubungan Amerika Serkat-Tiongkok-Taiwan.

2.3.2 Kembalinya Donald Trump pada Tahun 2025

Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat pada tahun 2025 menjadi titik penting dan akan memberikan pengaruh dalam perkembangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Taiwan. Trump dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 setelah memenangkan pemilihan presiden 2024 (CNN Indonesia, 2025). Kembalinya Trump menandai kesinambungan sekaligus potensi perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama karena pada periode pertamanya ia telah menunjukkan pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap Tiongkok dan lebih terbuka dalam memperkuat hubungan tidak resmi dengan Taiwan. Oleh karena itu, pemerintahan Trump tahun 2025 perlu dipahami sebagai kelanjutan dari pola kebijakan periode pertama, tetapi dalam konteks geopolitik yang lebih kompleks.

Kondisi geopolitik pada tahun 2025 ditandai oleh meningkatnya tekanan Tiongkok terhadap Taiwan dan semakin intensnya aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik. Pada tahun 2025, aktivitas militer Tiongkok meningkat di Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, sekitar Jepang, dan wilayah di luar *first island chain*. Khusus di sekitar Taiwan, PLA melakukan tingkat aktivitas udara dan maritim yang sangat tinggi, termasuk 3.764 aktivitas pesawat ke ADIZ Taiwan, meningkat 22,4% dibandingkan tahun sebelumnya, serta dua latihan besar bernama Strait Thunder-2025A dan Justice Mission 2025 (B. Lin et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika Trump kembali menjabat, isu Taiwan tidak lagi berada

dalam situasi yang relatif stabil, melainkan dalam lingkungan keamanan yang semakin sensitif dan rawan eskalasi.

Kembalinya Trump juga menimbulkan ekspektasi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena gaya kepemimpinannya yang transaksional, tidak mudah diprediksi, dan cenderung menjaga ruang manuver dalam isu strategis. RAND menilai bahwa Taiwan menghadapi *"strategic anxiety"* karena kembalinya Trump berbarengan dengan meningkatnya tekanan Tiongkok, sehingga Taipei perlu menyesuaikan diri dengan kemungkinan perubahan sikap dari mitra keamanan utamanya (Blanchette & DiPippo, 2025). Pemerintahan Trump juga tetap menunjukkan kecenderungan mempertahankan *strategic ambiguity*, yaitu tidak memberikan komitmen eksplisit mengenai tindakan Amerika Serikat apabila Tiongkok menggunakan kekuatan terhadap Taiwan (Shattuck, 2025). Dengan demikian, kembalinya Trump pada tahun 2025 menciptakan ketidakpastian baru dalam dinamika Tiongkok-Taiwan yang dapat dimaknai sebagai, dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan tetap berlanjut, tetapi bentuk, batas, dan konsistensi komitmennya sangat dipengaruhi oleh kalkulasi politik Trump.

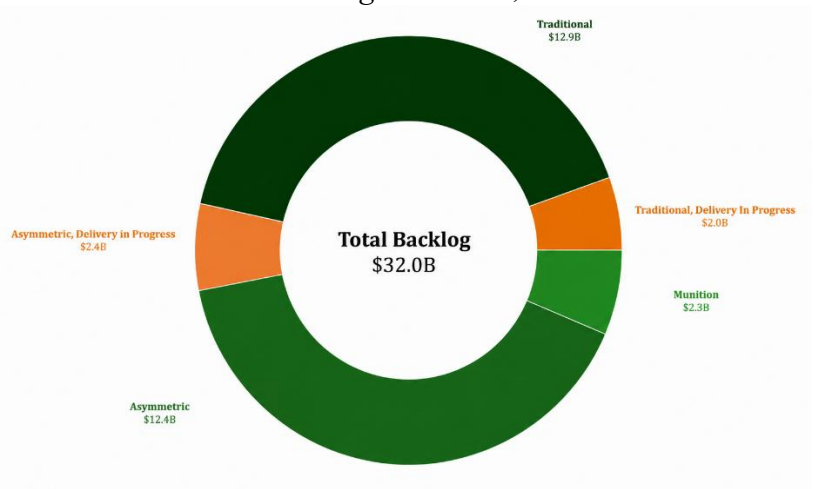
2.3.3 Kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan Tahun 2025

Kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan pada tahun 2025 menunjukkan kombinasi antara kesinambungan dan ketidakpastian. Di satu sisi, pemerintahan Trump tetap mempertahankan kerangka dasar hubungan AS-Taiwan yang sudah terbentuk sejak 1979, yaitu *One China Policy*, hubungan tidak resmi dengan Taiwan, *Taiwan Relations Act*, serta *strategic ambiguity*. Namun di sisi lainnya, gaya politik Trump yang transaksional dan sulit diprediksi membuat komitmen

Amerika Serikat terhadap Taiwan dipersepsikan lebih tidak pasti. Kondisi yang terjadi saat ini dapat dimaknai sebagai pergeseran dari *strategic ambiguity* menuju *strategic anxiety*, karena Taiwan menghadapi tekanan militer Tiongkok yang meningkat bersamaan dengan ketidakpastian terhadap sikap pemerintahan Trump (Blanchette & DiPippo, 2025).

Salah satu perkembangan penting pada tahun 2025 adalah perubahan bahasa resmi pemerintah Amerika Serikat mengenai Taiwan. Pada Februari 2025, Departemen Luar Negeri AS menghapus frasa *"we do not support Taiwan independence"* dari *fact sheet* resminya tentang hubungan AS-Taiwan. Perubahan tersebut juga disertai penyesuaian bahasa mengenai partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional, serta penambahan keterangan mengenai kerja sama Pentagon dengan National Science and Technology Council Taiwan (Al Jazeera, 2025). Di sisi lainnya, perubahan tersebut mendapat kritik dari Beijing yang menilai Amerika Serikat telah *"backpedaled"* dari posisinya mengenai Taiwan, sementara pemerintah Taiwan menyambut pembaruan bahasa tersebut sebagai sesuatu yang positif dan bersahabat bagi hubungan AS-Taiwan (Associated Press, 2025). Meskipun demikian, perubahan bahasa ini tidak serta-merta berarti Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Taiwan, melainkan menunjukkan adanya pergeseran simbolik dalam cara Washington menyampaikan dukungannya terhadap Taipei.

Gambar 2.1
U.S arms sale blocklog to Taiwan, December 2025



Sumber: https://tsm.schar.gmu.edu/taiwan-arms-sale-backlog-december-2025-update/

Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan pada tahun 2025 juga terlihat dalam aspek keamanan, meskipun tetap berada dalam kerangka ambiguitas. Upaya pemerintahan Trump dalam mempertahankan *strategic ambiguity*, dapat dilihat melalui kebijakan yang tidak memberikan komitmen pasti mengenai tindakan Amerika Serikat apabila Tiongkok menggunakan kekuatan (Shattuck, 2025). Dengan demikian, dukungan AS terhadap Taiwan tetap berlanjut, tetapi tidak dalam bentuk jaminan pertahanan otomatis. Pada sisi yang berbeda, seperti pada gambar 2.1, tepat pada akhir 2025 pemerintahan Trump menotifikasi lebih dari US$11 miliar penjualan senjata baru kepada Taiwan, sehingga total *backlog* penjualan senjata AS ke Taiwan meningkat menjadi sekitar US$32 miliar (Gomez & O'Connor, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sikap politik Trump sering kali ambigu, dukungan material terhadap pertahanan Taiwan tetap menjadi instrumen penting dalam kebijakan AS.

Namun, kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan pada tahun 2025 juga dibayangi oleh pendekatan Trump yang transaksional. Taiwan juga memiliki

kekhawatiran terhadap masa jabatan kedua Trump muncul karena Trump sebelumnya menilai Taiwan harus membayar lebih besar untuk perlindungan Amerika Serikat, bahkan membandingkan hubungan keamanan tersebut dengan hubungan antara perusahaan asuransi dan klien. Trump juga pernah menuduh Taiwan mengambil industri chip Amerika Serikat dan mendorong agar Taiwan meningkatkan belanja pertahanannya secara signifikan (Sang & Kiet, 2025). Pola ini menunjukkan bahwa dukungan Trump terhadap Taiwan tidak hanya dilihat melalui kacamata strategi keamanan, tetapi juga melalui kalkulasi ekonomi, pembagian beban pertahanan, dan kepentingan industri Amerika Serikat, terutama dalam sektor semikonduktor.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan pada tahun 2025 memperlihatkan pola yang kompleks. Pemerintahan Trump tetap menjaga hubungan tidak resmi dengan Taiwan, mempertahankan *strategic ambiguity*, memperbarui bahasa resmi yang lebih positif terhadap Taiwan, serta melanjutkan dukungan keamanan melalui penjualan senjata. Namun, pada saat yang sama, pendekatan Trump yang transaksional menciptakan ketidakpastian mengenai batas dan konsistensi komitmen Amerika Serikat. Pola ini penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tahun 2025 tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan strategis di Indo-Pasifik, tetapi juga oleh gaya kepemimpinan Trump yang menekankan fleksibilitas, tekanan ekonomi, dan ruang manuver politik dalam isu sensitif seperti Tiongkok-Taiwan.

2.3.4 Kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok Tahun 2025 dan Dampaknya dalam Dinamika Tiongkok-Taiwan

Setelah kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan tahun 2025 menunjukkan kombinasi antara dukungan keamanan dan *strategic ambiguity*, kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada tahun yang sama memperlihatkan sisi lain dari pendekatan Donald Trump. Dalam hubungan dengan Tiongkok, Trump kembali menempatkan tekanan ekonomi sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa isu Taiwan tidak dapat dipisahkan dari rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok yang lebih luas, khususnya dalam bidang perdagangan, teknologi, keamanan kawasan, dan pengaruh geopolitik di Indo-Pasifik.

Salah satu kebijakan utama Trump terhadap Tiongkok tahun 2025 adalah penggunaan tarif secara agresif. Pada April 2025, pemerintahan Trump memperkenalkan kebijakan tarif besar yang sering disebut sebagai *"Liberation Day"*, yang mencakup tarif dasar terhadap berbagai negara dan tarif tambahan terhadap mitra dagang tertentu, termasuk Tiongkok. Kebijakan perdagangan Trump pada periode kedua dirancang untuk mengubah kebijakan perdagangan Amerika Serikat melalui tindakan tarif yang luas dan cepat (Brown C. P., 2026). Dalam konteks Tiongkok, tarif tersebut memperlihatkan bahwa Trump menggunakan instrumen ekonomi bukan hanya untuk mengatasi defisit perdagangan, tetapi juga untuk menekan Beijing dalam persaingan strategis yang lebih luas.

Persaingan ekonomi tersebut juga berkaitan dengan persaingan teknologi dan rantai pasok. Tiongkok tidak hanya dipandang sebagai mitra dagang, tetapi juga

sebagai pesaing utama dalam sektor teknologi strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan mineral kritis. Oleh karena itu, kebijakan tarif Trump dapat dipahami sebagai bagian dari strategi *geoeconomic pressure*, yaitu penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik dan keamanan. Namun, tekanan ekonomi ini juga memiliki konsekuensi bagi Taiwan karena Taiwan berada di tengah rantai pasok teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Di sisi lainnya tarif Trump terhadap kawasan Asia Timur, termasuk ancaman tarif 32% terhadap barang dari Taiwan, mempercepat perubahan rantai pasok dan memperbesar tekanan terhadap posisi Taiwan dalam ekonomi regional (Freedman, 2025).

Sikap Trump terhadap Tiongkok pada tahun 2025 memperlihatkan pola yang konfrontatif tetapi juga transaksional. Di satu sisi, Trump menggunakan tarif, tekanan ekonomi, dan negosiasi perdagangan untuk menekan Beijing. Namun pada sisi lainnya, pendekatan tersebut tetap membuka kemungkinan kompromi apabila dianggap menguntungkan kepentingan Amerika Serikat. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan Trump terhadap Tiongkok tidak hanya didorong oleh logika ideologis, tetapi juga oleh kalkulasi negosiasi. Ghuam Ali dalam artikelnya turut menilai bagaimana bentuk pendekatan Trump yang transaksional dan sulit diprediksi meningkatkan ketidakpastian di Selat Taiwan karena kebijakan terhadap Taiwan dan Tiongkok dapat berubah mengikuti kalkulasi ekonomi dan politik Washington (Ali, 2026a).

Tiongkok merespons tekanan Amerika Serikat dengan kombinasi retaliasi ekonomi dan penguatan posisi strategis. Dalam sektor ekonomi, Beijing menggunakan tarif balasan dan pembatasan ekspor mineral kritis sebagai alat tawar

terhadap Washington. Pada 2025 Tiongkok memperluas pembatasan ekspor *rare earth* dan *permanent magnets*, termasuk pembatasan yang dapat berdampak pada sektor pertahanan dan semikonduktor Amerika Serikat (Baskaran, 2025). Respons ini menunjukkan bahwa persaingan AS-Tiongkok tidak hanya berlangsung melalui tarif, tetapi juga melalui kontrol atas sumber daya strategis yang penting bagi industri teknologi dan pertahanan. Dalam konteks Taiwan, respons Tiongkok terhadap tekanan AS memperkuat persepsi bahwa Selat Taiwan menjadi bagian dari persaingan besar antara dua kekuatan ekonomi dan militer.

Taiwan juga merespons kebijakan Trump dengan cara yang berhati-hati. Di satu sisi, Taiwan tetap membutuhkan dukungan keamanan Amerika Serikat untuk menghadapi tekanan Tiongkok. Namun di sisi lain, kebijakan tarif Trump terhadap Taiwan menunjukkan bahwa hubungan AS-Taiwan tidak sepenuhnya bebas dari tekanan ekonomi. Taiwan sendiri juga merupakan negara yang terdampak kebijakan *reciprocal tariffs* Trump pada April 2025, dengan ancaman tarif 32% terhadap produk Taiwan sebelum adanya penangguhan sementara selama 90 hari, sementara tarif dasar 10% tetap dipertahankan (Singh, 2025). Presiden Lai Ching-te kemudian merespons dengan menawarkan pembukaan kembali negosiasi perdagangan, pengurangan tarif secara resiprokal, peningkatan pembelian barang Amerika Serikat, tambahan pengadaan pertahanan, serta investasi Taiwan di Amerika Serikat (Office of the President Taiwan), 2025). Respons tersebut menunjukkan bahwa Taiwan berusaha menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat sambil mengurangi risiko ekonomi akibat pendekatan transaksional Trump.

Dengan demikian, kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok tahun 2025 berdampak langsung terhadap dinamika Tiongkok-Taiwan. Tarif dan tekanan ekonomi terhadap Tiongkok memperkuat persaingan strategis Amerika Serikat-Tiongkok, sedangkan dukungan keamanan dan ambiguitas terhadap Taiwan menempatkan Taipei dalam posisi yang semakin kompleks. Taiwan memperoleh manfaat dari dukungan Amerika Serikat, tetapi juga menghadapi tekanan ekonomi dari kebijakan tarif Trump dan risiko menjadi bagian dari tawar-menawar Washington-Beijing. Oleh karena itu, kebijakan Trump pada tahun 2025 memperlihatkan kombinasi antara tekanan ekonomi terhadap Tiongkok, dukungan terbatas terhadap Taiwan, dan ketidakpastian strategis yang dapat memengaruhi stabilitas kawasan. Pola inilah yang nantinya penting dianalisis melalui *Leadership Trait Analysis*, karena kebijakan tersebut memperlihatkan karakter Trump yang transaksional, konfrontatif, percaya diri, dan cenderung menggunakan tekanan ekonomi sebagai instrumen utama dalam kebijakan luar negeri.